BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis kepercayaan melanda panggung politik era reformasi. Gejala ketidakpercayaan massa terhadap elite pemerintahan dan partai politik diindikasikan oleh berkembangnya sikap apatis dan apriori terhadap perilaku politik dan kebijakan-kebijakan publik. Di pihak lain berkembang juga sikap saling mencurigai antar elite dan lebih dari itu elite tidak percaya pada diri sendiri yang ditunjukkan dengan perilaku dan kebijakan-kebijakan paranoid.[1]

Harapan terjadinya perbaikan di segala bidang dengan runtuhnya rezim Orde Baru tak kunjung dirasakan rakyat. Perilaku elite politik dalam segala dimensi justru semakin tak terkonrtol. Praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) merajalela di daerah dan pusat. BUMN menjadi ajang kapling-kapling partai. Penegakan hukum terhadap pelaku KKN dan pelanggaran HAM tak jua menampakkan hasil. Elite hampir selalu memilih untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok atau partai ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat dan agenda reformasi. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL), harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif telepon, yang memicu kebijakan yang tidak memihak rakyat.

Elite pemerintahan dan partai politik juga larut dalam konfiik kepentingan (*conflict of interests*) yang dalam. Kasus ketegangan Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR berujung pada penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR 2001 yang

menjatuhkan presiden, merupakan puncak dari konflik antar elite. Ketidakpercayaan elite pada diri sendiri dibuktikan dengan mereduksi hak politik menjadi kewajiban politik. Hak warga negara untuk menggunakan hak suara dipagari dengan ancaman hukuman bagi para penganjur golongan putih

Istilah golongan putih atau golput pertama kali dikenalkan Arief Budiman dan kawan-kawan menjelang Pemilu 1971 untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak memilih karena kecewa terhadap sistem politik yang dinilai tidak demokratis. Sampai Pemilu 1997, gerakan golput semakin popoler di kalangan mahasiswa dan perkotaan. Menjelang Pemilu 2004, DPR mengesahkan pasal yang memberikan ancaman kurungan maksimum 12 bulan bagi penganjur golput yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan (UU No. 12/2003 pasal 139 ayat 1). Diktum ".... Dengan sengaja menggunakan kekerasan"[2] dan pengurangan ancaman dari tiga tahun pidana penjara merupakan sikap kompromi DPR setelah klausal tersebut ditentang oleh banyak kalangan-terutama LSM dan intelektual, termasuk Prof. DR. Arief Budiman.

Persoalan-persoalan itu menimbulkan kebingungan, kebosanan, kekecewaan dan frustasi rakyat seiring dengan meningkatnya perasaan teralienasi dan termarjinalisasi. Tidak heran jika krisis kepercayaan terhadap elite semakin meluas. Dalam bidang hukum, rakyat dengan enteng bertindak brutal terhadap pencuri sandal jepit. Dalam bidang politik, hampir tak ada DPR atau DPRD yang tidak dicemooh rakyat karena perilaku dan kebijakannya. Sebagian lainnya mengancam tidak terlibat

---

[1] Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP2I, Semarang, 2003, hal. 171.
[2] UU RI No. 12 Tahun 2003 [illegible]

dalam Pemilu 2004. Di bidang sosial, tawuran antar kampung terjadi dimana-mana dan menjadi komoditas *seksi* di media massa.

Semua itu menjadi prolog yang memprihatinkan menjelang Pemilu 2004, krisis kepercayaan dan kepemimpinan setiap saat bisa melahirkan ketidakpercayaan politik (*political distrust*). Ketidakpercayaan politik dipahami sebagai benih anarkhi di tingkat massa. Apakah elite yang berkuasa bisa menjamin negara? Sampai kapan ketidakpastian terus terjadi? Apakah negeri ini dapat dipertahankan?

Krisis kepercayaan dan kepemimpinan jelas berpengaruh terhadap Pemilu 2004. Pemilu adalah saat "kontrak politik" rakyat dan elite dilakukan. Tanpa dukungan dan "tanda tangan" rakyat, elite bukanlah elite karena tidak akan bisa menduduki jabatan publik. Ketidakpercayaan yang berkembang di masyarakat menyiratkan "benang putus" antara rakyat, partai politik, elite, pemilu, maupun sistem politik secara umum.

Untuk mengantisipasi putusnya hubungan tersebut kesadaran tentang politik dari masyarakat terutama masyarakat pemilih menjadi sesuatu yang sangat penting karena tanpa kesadaran tersebut masyarakat tidak mungkin bisa berpartisipasi secara positif. Pendidikan politik menjadi penting karena lewat pendidikan politiklah bisa terbentuk kesadaran politik masyarakat.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, merupakan salah satu lembaga yang diharapkan bisa memberikan pendidikan politik secara netral karena pendidikan politik tidak bertujuan untuk menumbuhkan loyalitas indivisu pada suatu pihak tertentu, sebaliknya pendidikan politik justru

mampu melakukan dialog yang konstruktif dan bertindak membawa ke arah perubahan yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DI SEKITARNYA MENGHADAPI PEMILU 2004 (Studi Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendidikan politik masyarakat di sekitar Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?
2. Bagaimana peran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat di sekitarnya dalam menghadapi Pemilu 2004?

C. Tinjauan Pustaka

1. Peranan

Peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu.. Pengertian peran menurut Plano, dan kawan-kawan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.[3]

[3] Jack C. Plano [illegible]

Pendapat lain mengenai definisi peranan diungkapkan oleh Block sebagai berikut:

> Suatu konsep yang dipakai oelh sosiolog untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sosial dengan tuntutan yang dilakukannya.[4]

Dari pendapat di atas bahwa konsep peranan berhubungan dengan perilaku dan tingkah laku seseorang atau organisasi karena tuntutan dari posisi yang didudukinya untuk mempengaruhi pengambilan maupun pelaksanaan keputusan yang sah bagi masyarakat.

Sedangkan menurut Astrid S. Susanto, dalam peranan sedikitnya mengandung tiga hal, yaitu:

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Pernan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.[5]

Apabila definisi-definisi tersebut diaplikasikan kepada peran perguruan tinggi maka setiap perguruan tinggi mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola hubungan yang dikembangkan berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penelitian ini maka peran yang diharapkan diri perguruan tinggi adalah dalam pelaksanaan dharma ketiga yaitu pengabdian masyarakat. Hal ini

---

[4] Hubert M. Block Jr., Pengantar Penelitian Sosial, Rajawali Press, Jakarta, 1987, hal. 105

[5] Astrid S. Susanto, [illegible]

Pendapat lain mengenai definisi peranan diungkapkan oleh Block sebagai berikut:

> Suatu konsep yang dipakai oelh sosiolog untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sosial dengan tuntutan yang dilakukannya.[4]

Dari pendapat di atas bahwa konsep peranan berhubungan dengan perilaku dan tingkah laku seseorang atau organisasi karena tuntutan dari posisi yang didudukinya untuk mempengaruhi pengambilan maupun pelaksanaan keputusan yang sah bagi masyarakat.

Sedangkan menurut Astrid S. Susanto, dalam peranan sedikitnya mengandung tiga hal, yaitu:

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Pernan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.[5]

Apabila definisi-definisi tersebut diaplikasikan kepada peran perguruan tinggi maka setiap perguruan tinggi mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola hubungan yang dikembangkan berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penelitian ini maka peran yang diharapkan diri perguruan tinggi adalah dalam pelaksanaan dharma ketiga yaitu pengabdian masyarakat. Hal ini

---

[4] Hubert M. Block Jr., Pengantar Penelitian Sosial, Rajawali Press, Jakarta, 1987, hal 105

[5] Astrid S. Susanto, [illegible]

sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

2. PERGURUAN TINGGI

Perguruan tinggi adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan atau profesional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia (Kepmendikbud No. 0186/P/1984)[6]

Di samping itu, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perguruan tinggi adalah lembaga mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam penelitian ini, lebih merujuk kepada definisi yang teraknir.

3. Pendidikan Politik

a. Konsep Pendidikan Politik

Edgar Fore dan kawan-kawan mendefinisikan pendidikan politik sebagai penyiapan generasi untuk berpikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya, faktor-fasktor yang berpengaruh dalam lembaga-lembaga atau berpengaruh dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut. Dalam kaitan itu, tujuan pendidikan politik adalah menumbuhkan kesadaran politik [illegible]

manusia yang kenyang dengan jiwa demokrasi.[7] Dengan demikian, bagi Fore dan kawan-kawan esensi pendidikan politik adalah mengaitkan aktivitas pendidikan dengan praktik-praktik kekuasaan secara seimbang, berguna dan demokratis.

Tekanan Edgar Fore dkk. pada pendidikan formal yang mempersoalkan seputar praktik demokrasi kekuasaan, dan terfokus pada kekuasaan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, bukan tanpa kritik. Pendidikan politik dapat pula dilakukan secara non-formal oleh partai, media massa, LSM-LSM atau bahkan secara informal di dalam keluarga. Masing-masing memiliki urgensi dan implikasi-implikasi yang berbeda-beda walaupun bermuara pada satu titik: demokrasi.

C.V. Good memberikan tekanan pada pentingnya kesadaran dan partisipasi sebagai tujuan dalam pendidikan politik. Dalam pandangannya, pendidikan politik adalah pengembangan kesadaran generasi terhadap berbagai problematika persoalan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pengembangan aspek itu dapat dilakukan dengan berbagai sarana, seperti diskusi-diskusi non-formal, ceramah-ceramah, dan partisipasi dalam kegiatan politik.[8] Dalam hal itu, peranan partai dalam menjalankan fungsinya sangat menentukan.

Konsep-konsep di atas secara implisit menjelaskan bahwa internalisasi ideologi sangat terbuka, hal mana menunjukkan latar belakang kedua ahli tersebut (barat). Hal itulah yang membedakankannya dengan konsep falentina Bechova. Menurut pendapat bechova, pendidikan politik dan tujuan-tujuannya adalah aktivitas ideologi yang bertujuan untuk mengkokohkan para anggota organisasi kepartaian

---

[6] Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 1.
[7] Edgar Fore dkk. [illegible]

dalam hal kesadaran dan pemahaman problematika menyangkut ideologi dan politik partai, agar mereka dapat mentransformasikan unsur-unsur ideologi pemikiran dan pengalaman politiknya kepada publik untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.[9] Ini semua dilakukan dengan cara menjelaskan hakikat politik partai, memperluas wawasan politiknya, dan mengajarkan bagaimana memahami peristiwa yang terjadi pada kehidupan dalam dan luar negeri, yang bisa melakukan penyadaran politik di tengah masyarakat dan menjadi penyalur bagi tersambungnya kesadaran dan aktivitas politik partai.

Proses kegiatan yang memberikan perhatian kepada individu untuk melakukan praktik politik, memahami masyarakat tempat mereka hidup, dan memberikan batasan standar kewarganegaraan dan mengenali pilar-pila kewarganegaraan yang baik. Dengan begitu terbentukilah kesadaran politik. Pendidikan politik bukan sekedar pelatihan kewarganegaraan (*civic education*) pemuda dalam sistem politik akan tetapi juga pembentukan sejumlah orientasi, model-model perilaku dan loyalitas pada diri pemuda.

b. Kerangka Pendidikan Politik

Berdasarkan uraian di atas, dapat dimengerti bahwa pendidikan politik bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik, kesadaran politik, meningkatkan kemampuan partisipasi politik agar individu menjadi partisan politik yang positif.

---

[8] C.V. Good, *Dictionary of Education*, Mc Grew Hill, New York, 1973, hal 67.
[9] Falentina Bechova, Tarbiyatu Al-Jamahir, Al-Manhaj wa As-Suluk, dalam Joko J Prihatmoko,

Bagi Indonesia saat ini, pendidikan politik harus diikhtiarkan sebagai upaya memperkuat masyarakat sipil yang serta merta bermanfaat untuk mendorong fase transisi demokrasi ke fase konsolidasi demokrasi. Di satu sisi, pendidikan politik bermanfaast untuk meningkatkan kesadaran sebagai warga negara yang memandang pentingnya dukungan dan ikhtiar bagi upaya-upaya peningkatan fase demokrasi. Di sisi lain, pendidikan politik meningkatkan partisipasi masyarakat secara otonom dan kritis dalam panggung politik dan penghormatan terhadap fungsi-fungsi kelembagaan politik.

Dengan demikian, pendidikan politik diarahkan untuk membentuk kepribadian demokrasi. Tidak ada kesadaran politik tanpa kepribadian politik, dan bahwa jenis dan tingkat partisipasi polirik dipengaruhi oleh budaya politik yang membentuk kandungan kepribadian politik, kepribadian politik adalah sejumlah orientasi yang terbentuk pada individu dalam menghadapi dunia politik.

c. Tujuan Pendidikan Politik

Sebagaimana dikemukakan di atss, pendidikan politik bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, sebagaimana juga bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada individu, agar individu menjadi partisan politik yang positif.

Lazimnya sebuah pendidikan, selalu ada tiga dimensi yang hendak ditransformasikan, yakni kognisi (pengetahuan), afeksi (sikap dan evaluasi) dan psikomotorik (perilaku). Yang diksebut kognisi adalah pengetahuan mengenai demokrasi, asal usul, perkembangan

dan sebagainya. Adapun yang dimaksud afeksi adalah sikap dan pandangan terhadap tindakan-tindakan demokratis, lembaga demokratis, sistem demokrasi, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud psikomotor adalah semua tindakan demokratis yang berhubungan dengan penyelenggaraan kekuasaan.

Namun pendidikan politik lebih bersifat "incidental learning" daripada "intentional learning". "Intentional learning" berlangsung dalam sistem persekolahan dengan tujuan utama pengembangan aspek kognitif (pengetahuan), adapun "incidental learning" berlangsung dalam kejidupan riil masyarakat dengan arah utama adalah pengembangan aspek afektif (sikap) dan psikomotor (perilaku). Pendidikan politik diorientasikan pada berbagai tingkatan mulai dari yang paling kecil, individu, kelompok sosial dan komunitas, sampai orghanisasi yang lebih besar.

4. Masyarakat

Istilah masyarakat setempat (community) menunjuk pada bagian masyarakat yangt bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana faktor utsama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara sesama anggota, dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya.[10]

D. Tujuan Penelitian

1. Diketahuinya pendidikan politik masyarakat di sekitar Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2. Diketahuinya peranan lembaga pendidikan tinggi khususnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam meningkatan pendidikan masyarakat di sekitarnya dalam menghadapi Pemilu 2004.

E. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk meningkatkan pelaksanaan misinya untuk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa maupun pencerahan umat manusia

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Strategi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pemakaian strategi ini dimaksudkan agar diperoleh pengetahuan yang mendalam terhadap objek yang diteliti. Di samping itu penelitian dengan mempergunakan studi kasus diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan terhadap objek yang sama untuk daerah lain. Melalui strategi studi kasus ini akan diketahui apakah permasalahan yang ditemui di lokasi penelitian tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya, atau mungkin ditemukan kasus baru yang tidak terdapat di daerah-daerah lain yang pernah diteliti sebelumnya.

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis dalam arti bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memaparkan situasi atau peristiwa yang diamati, menjabarkan dan menadukan permasalahan dan data yang diperoleh dari

hasil pengamatan untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab masalah penelitian.

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah masyarakat penduduk Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Sedangkan teknik pengambilan sampelnya dengan mempergunakan teknik Random sampling (sampling acak) dimana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai responden. Populasi penelitian ini adalah para pemilih pada Pemilu 2004 di Desa Tamantirto yang berjumlah 13.901 orang. Jumlah sampel sebanyak 118 orang, diambil berdasarkan tabel Frank Lynch pada kondisi III.[11]

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pencarian data dilakukan dengan cara wawancara berstruktur, dimana penyusun menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, dengan menggunakan kuesioner. Teknik ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang representatif ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan disusun secara ketat. Semua responden dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.[12] Sedangkan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, dipergunakan teknik wawancara

---

[11] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (editor), *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 171

[12] [illegible]

mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang tidak berstruktur. Hasil wawancara ini diharapkan akan menemukan kekecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.[13]

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Perlu dikemukakan bahwa analisa data itu dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan. Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah berikutnya adalah mengadakan *reduksi data* yang dilakukan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah *menyusunnya dalam satuan-satuan*. Kemudian adalah *mengkategorisasikan* satuan-satuan ini sambil membuat *koding*. Tahap akhir dari analisa data ialah *mengadakan pemeriksaan data keabsahan data*. Dalam menganalisa data yang telah terhimpun penyusun menggunakan teknik statistik sederhana, yaitu analisis tabel frekuensi dan analisa tabel silang. Adapun ukuran-ukuran statistik yang dipergunakan adalah prosentase, yaitu untuk mengetahui proporsi sesuatu terhadap total keseluruhan. Seperti diketahui, cara penggunaan data kuantitatif yang paling sederhana adalah dalam bentuk prosentase, yang pada

[13] *Op. cit.*, hal 189-214

hakekatnya bertujuan untuk memperlihatkan dengan tegas besarnya secara relatif antara dua angka atau lebih, atau dengan kata lain untuk menyederhanakan gambaran dari hubungan antara dua angka atau lebih. Setelah selesai tahap ini, mulailah tahap penafsiran data untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Inilah tahap yang paling sulit, karena dalam menafsirkan data tersebut untuk kemudian menarik sebuah kesimpulan